

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : JL. KH. ABDULLAH BIN NUH NO. 18-19 CIANJUR

Nomor Telepon : 263288346

Penjelasan Umum : PENGERTIAN TATA KELOLA : Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan, prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah-langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi. Struktur Tata Kelola PT. BPR Dana Pos telah merujuk pada Peraturan Struktur Tata Kelola PT. BPR Dana Pos telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT. BPR Dana Pos posisi 31 Desember 2023 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp8.840.410.097,- sedangkan Modal Inti BPR sebesar Rp6.074.566.629,-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	MUHAMMAD ALI	Direktur Utama	Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS : a) menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan. b) mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c) mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d) menghapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan. e) melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. Dikarenakan pada tahun 2022 BPR Dana Pos hanya memiliki satu Direksi sehingga Dirut sekaligus sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah lulus uji kompetensi dengan sertifikat nomor 64127 1120 6 3893 2019

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Penggantikan direksi berdasarkan RUPS. Pemenuhan kekurangan Direksi akan dipenuhi pada akhir tahun 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	H. DADANG RACHMAT	Komisaris Utama	Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal (SKAI). Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya : pelanggaran atau keadaan yg dapat membahayakan BPR. Membentuk paling kurang Komite Audit, dan Komite Pemantau Resiko.

Rekomendasi Kepada Direksi

Komisaris Utama telah lulus uji kompetensi dengan sertifikat nomor 64127 1120 6 0844 2022

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pangkat komisaris berdasarkan RUPS, Pemenuhan kekurangan Komisaris akan dipenuhi pada akhir tahun 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR Dana Pos belum membentuk komite audit, komite pemantauan resiko dan komite remunerasi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR Dana Pos belum membentuk komite audit, komite pemantauan resiko dan komite remunerasi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR Dana Pos belum membentuk komite audit, komite pemantauan resiko dan komite remunerasi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direktur Utama tidak memiliki saham pada PT. BPR Dana Pos

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direktur Utama tidak memiliki saham baik di Bank Lain maupun di Perusahaan Lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	MUHAMMAD ALI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direktur Utama tidak memiliki hubungan keuangan dengan Komisaris Utama maupun Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	MUHAMMAD ALI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direktur Utama tidak memiliki hubungan Keluarga baik dengan Komisaris Utama dan Pemegang saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	H. DADANG RACHMAT	300.000.000	3,16

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama memiliki saham pada BPR Dana Pos sebesar Rp300.000.000,- atau sebesar 3,16%

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama tidak memiliki saham baik pada Bank Lain maupun Perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	H. DADANG RACHMAT	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keuangan, baik dengan Direktur Utama dan Pemegang Saham lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	H. DADANG RACHMAT	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama tidak mempunyai hubungan keluarga dengan direktur Utama maupun dengan Pemegang Saham lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	180000000	1	120000000
2	Tunjangan	2	0	2	0
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
	Total		180000000		120000000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji Komisaris Utama dan direktur Utama yang diberikan sesuai RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	Tidak ada
4	Fasilitas lainnya	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi mendapat fasilitas BPJS kesehatan yang dibayarkan perusahaan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,19	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,00	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,50	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,96	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Penentuan gaji pegawai disesuaikan dengan UMR, dan untuk direksi serta komisaris ditentukan berdasarkan RUPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	30-01-2023	2	Membahas kredit RSUD Bunut : Maksimal Plafond Rp50.000.000,- Jangkang Waktu 5 Tahun (60 bulan) Biaya administrasi Rp350.000,- biaya pelunasan kredit lepas sebesar 2,5% dari sisa pokok
2	04-06-2023	2	Membahas rencana bisnis untuk memenuhi target RBB tahun 2023, 1. Menggali potensi bisnis kredit pensiun 2. Optimalisasi mitra yang ada (koperasi Nusantara dan RSUD Bunut) 3. Meningkatkan pengawasan terhadap kredit yang ada terlebih kredit yang telah direstruk
3	20-11-2023	2	dilaksanakan rapat antara direksi dan komisaris, yang membahas : A. Bisnis, akan mencairkan kembali kredit pensiun mulai Januari 2024 dengan target perbulan sebesar Rp500.000.000,- segera buat fitur produk dan SOP, RSUD target Rp250.000.000,- dan Kredit Karyawan Swasta Rp170.000.000,- . B. Sumber Daya Manusia, akan menambah karyawan untuk bagian marketing sebanyak 6 orang. C. Penambahan Pengurus akan dipenuhi dibulan Oktober 2024. D. Pendanaan, penempatan DPK berupa deposito disesuaikan dengan kebutuhan. E. Ratio-Ratio, Penyusunan RBB tahun 2024 harus tetap memperhatikan ratio-ratio sehingga pertumbuhan BPR sehat yang didasari oleh kehati-hatian dalam menjalankan bisnis yang aman dan sesuai dengan ketentuan.
4	05-12-2023	2	dilaksanakan rapat antara direksi dan komisaris, yang membahas : A. Bisnis, akan mencairkan kembali kredit pensiun mulai Januari 2024 dengan target perbulan sebesar Rp500.000.000,-. B. Sumber Daya Manusia, akan menambah karyawan untuk bagian Operasional. C. Penambahan Pengurus akan dipenuhi dibulan Oktober 2024. D. Pendanaan, penempatan DPK berupa deposito disesuaikan dengan kebutuhan. E. Ratio-Ratio, Penyusunan RBB tahun 2024 harus tetap memperhatikan ratio-ratio sehingga pertumbuhan BPR sehat yang didasari oleh kehati-hatian dalam menjalankan bisnis yang aman dan sesuai dengan ketentuan.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Agenda rapat yang telah dijalankan oleh Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi telah dituangkan dalam Notulen Rapat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	H. DADANG RACHMAT	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kehadiran anggota dewan komisaris telah sesuai minimal 4 kali dalam 1 tahun

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada penyimpangan internal

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi selama tahun 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	RAHMAT	PSP	MUHAMMAD ALI	DIREKTUR UTAMA	TRANSFER	13	Sewa Ruang untuk gudang kepada Joshua Rahmat anak kandung dari Bp. Rahmat selaku PSP pada BPR Dana Pos.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Harga sewa dibawah harga pasaran, yaitu sebesar Rp12.500.000,- sementara harga pasar antara Rp70.000.000 sd Rp80.000.000,-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada Tahun 2023 BPR tidak melakukan kegiatan sosial dan Politik

Nama BPR	: PT. BPR Dana Pos
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: JL. KH. ABDULLAH BIN NUH NO.18-19
Nomor Telepon	: (0263)-288346
Modal Inti BPR	: 6.228.978.411,00
Total Aset BPR	: 9.054.014.616,00
Bobot BPR	: A
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,9
Peringkat Komposit	: 3
Analisis	: Dari penilaian Tata Kelola yang ada di BPR Dana Pos telah melaksanakan ketentuan sebagaimana POJK yang ada, namun terdapat keterbatasan dalam penerapan yang diakibatkan masih terdapatnya rangkap jabatan di beberapa bagian, hal tersebut mengingat pada akhir tahun 2021 BPR Dana Pos melakukan efisiensi pegawai yang berimbas pada pengurangan jumlah karyawan dan sampai akhir tahun 2022 masih belum pulih, hal tersebut dilakukan mengingat pandemi covid-19 yang sangat dirasakan imbasnya terhadap bisnis PT. BPR Dana Pos, kedepan BPR Dana Pos akan kembali menggalakan bisnis dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian sehingga BPR Dana Pos diharapkan dapat tumbuh dengan baik dan rangkap jabatan yang saat ini terpaksa dilakukan dapat ditata kembali sehingga penerapan Tata Kelola dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,42	1,20	0,30	2,92	0.584	Direktur Utama telah menjalankan tugas sesuai dengan pedoman dan Tatib Direksi, serta Direktur Utama telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dengan sertifikasi nomor 64127 1120 6 3893 2019 dan diangkat melalui RUPS
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,39	1,20	0,20	2,79	0.419	Komisaris Utama telah menjalankan tugas sesuai dengan pedoman dan Tatib Komisaris, serta Komisaris Utama telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dengan sertifikat nomor 64127 1120 6 0844 2022 dan diangkat melalui RUPS
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	BPR Dana Pos belum memiliki Komite Audit & Komite Pemantau Risiko karena modal inti BPR kurang dari 80 Miliar, untuk Audit dilaksanakan oleh Audit Intern sementara untuk Pemantau Risiko dilaksanakan oleh PE MR.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	1,20	0,30	3,00	0.300	Bila ada Benturan kepentingan maka diselesaikan secara musyawarah
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,50	1,20	0,30	3,00	0.300	Dikarenakan hanya memiliki satu Direktur maka Direktur Utama sekaligus sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan serta SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaannya
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,60	1,10	0,25	2,95	0.295	Telah ditunjuk Petugas Audit Intern serta telah ada SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,50	1,20	0,30	3,00	0.075	Dalam penerapan fungsi Audit Ekstern BPR telah bekerjasama dengan KAP yang dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan POJK yang berlaku
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,67	1,26	0,30	3,23	0.323	Telah ditunjuk PE MR yang dirangkap oleh Kepala Cabang Sukabumi, telah dibuat SOP MR
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,50	1,20	0,30	3,00	0.225	Kententuan pemberian kredit sesuai PKPB dan SOP serta tidak ada pelampauan BMPK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,34	1,20	0,20	2,74	0.206	RBB PT. BPR DanaPos telah mendapat Persetujuan dewan Komisaris dan mendapat dukungan dari pemegang saham, RBB yang disusun menggambarkan rencana dan strategi bisnis BPR selama 1 thn kedepan, dengan memperhitungkan faktor eksternal, azaz perbankan yg sehat dan prinsip kehati-hatian serta faktor risiko, serta telah disampaikan ke OJK pada tanggal 06 Desember 2022
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	1,00	0,20	2,20	0.165	Penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan data yg diinput/update serta laporan tahunan yang disajikan sesuai dengan hasil pemeriksaan KAP dan telah sesuai dengan ketentuan OJK telah dilakukan transparansi informasi Laporan tahunan dan Lap Publikasi dilaporkan sesuai ketentuan OJK Laporan disampaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Nilai Komposit						2.9	
Peringkat Komposit						Cukup Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Fungsi kepatuhan belum diterapkan di BPR, dikarenakan hanya ada satu direktur maka Direktur Utama sekaligus yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	3	Direktur Utama tinggal di kabupaten yang sama, dimana kantor pusat BPR berada
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	3	Direktur Utama tidak memiliki rangkap jabatan di Bank Lain atau perusahaan non bank atau lembaga lainnya
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	3	Direktur Utama tidak memiliki hubungan keluarga dengan Komisaris Utama maupun dengan Pemegang saham
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi PT BPR DanaPos telah lulus sertifikasi direksi, Muhammad ali No. 64127 1210 6 3871 2019
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	3	RUPS-LB pengangkatan direksi tanggal 09 Agustus 2021, nomor Akta RUPS 04 tanggal 19 Januari 2022 oleh Notaris Ardiansyah, SH.MKn, SK Menhukam AHU-AH.01.03-049890 tanggal 24 Januari 2022 dan telah ditatausahakan oleh OJK, surat persetujuan nomor S-198/KR.0211/2021 tanggal 31 Desember 2021,
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,83	
	Bobot	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,42	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	3	Direksi telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Direksi telah melaksanakan sebagian besar hasil temuan dan rekomendasi audit intern, audit ekstern dan pengawas OJK
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	3	Dewan komisaris telah mendapat informasi mengenai perkembangan BPR
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Pengambilan keputusan yg bersifat strategis berdasarkan hasil mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	3	Tidak ada kepentingan pribadi anggota direksi dalam pengambilan keputusan
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Selalu berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang perbankan, dengan mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan-pelatihan baik yg diselenggarakan oleh pihak ekstern
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Kredit senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian serta BMPK, dan tidak terdapat kredit yang melampaui BMPK
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	3	Telah ada Tatib Direksi sebagai pedoman
	Total nilai skala penerapan	24	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	3	Hasil pertanggungjawaban kinerja tertuang dalam RUPS tertanggal 05 Januari 2023
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	3	Kebijakan-kebijakan perusahaan telah disampaikan kepada seluruh bagian terkait
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Hasil rapat terdokumentasikan dengan baik
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Untuk meningkatkan kemampuan melalui pelatihan-pelatihan yg diselenggarakan oleh ojk alau lembaga lain
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	3	Telah disampaikan ke OJK, Asosiasi BPR melalui web, dan media BPR melalui web
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	3	Jumlah Komisaris BPR Danapos 1 orang, Komisaris Utama H. Dadang Rachmat, pemenuhan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	3	Jumlah komisaris 1 belum sesuai ketentuan paling sedikit atau sama dengan jumlah direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Komisaris Utama telah lulus uji kompetensi dengan sertifikat nмор 64127 1120 6 0844 2022
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	3	Komisaris Utama berdomisili diKabupaten yang sama dengan Kantor Pusat BPR
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Dengan modal inti kurang dari Rp50 M BPR DanaPos memiliki 1 komisaris
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	3	Ya, Pedoman dan Tatib Komisaris telah dimiliki dengan SK no. 003/DIR-BPR/V/2018, tanggal 02 Mei 2018, dan telah disampaikan ke OJK
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	3	Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan pada bpr lain
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	3	komisaris tidak memiliki hubungan keluarga Direktur Utama dan pemegang saham lain

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	3	Komisaris utama memiliki saham 3,16 persen dan tidak sebagai Pengendali.
	Total nilai skala penerapan	25	
	Rata-rata	2,78	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,39	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaan
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	3	Ya, senantiasa sharing dan melakukan Evaluasi
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	3	Ya, dewan komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Ya, temuan audit senantiasa dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan turut serta melakukan monitoring
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Rapat dewan komisaris dengan anggota direksi kadang-kadang komisaris & Direktur utama dan hasil rapat tertuang dalam notulen rapat

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Keputusan yg diambil yg bersifat strategis berdasarkan hasil mufakat
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	3	Tidak ada pemanfaatan jabatan
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Selalu memantau hasil temuan yg memerlukan tindak lanjut
	Total nilai skala penerapan	24	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat terdokumentasikan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Komite audit dirangkap oleh Audit Internal, komite pemantau Risiko dirangkap oleh PE Kepatuhan dan MR.
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Dirangkap Audit, sebagai Audit Internal
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Telah ada fungsi MR
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	BPR Belum membentuk Komite
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	BPR Belum membentuk Komite
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	Tercantum di tatib direksi dan Komisaris
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Tercantum di tatib direksi dan Komisaris, dan sebagai contoh adalah sewa ruang yang dilakukan dengan Joshua Rahmat (anak pemilik), nilai sewa jauh dibawah harga pasaran, pasaran sewa 1 tahun Rp70.000.000,- sd Rp80.000.000,- sementara harga sewa BPR Rp12.500.000,- dan dituangkan dalam Perjanjian Sewa dengan no.001/LGL/BPR-DP/I/2023 tanggal 27 Januari 2023
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	Ya, senantiasa dilakukan rapat dan didokumentasikan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	3	Secara bertahap fungsi kepatuhan oleh Direktur diterapkan kepada seluruh organ kerja BPR
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Senantiasa terus meningkatkan pemahaman atas regulasi dan POJK
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	3	Telah ditunjuk PE dengan SK No.003/SK/DIR-SDM/XI/2020 tanggal 09 November 2020 dan disampaikan ke OJK dengan surat pengantar No. 272/BPR-DP/XI/2020 tanggal 13 November 2020 an Euis Herawati
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Ya, telah ada pedoman kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	Ya, telah memiliki SOP dan Jobdesk masing-masing
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Belum disusun rencana kerja kepatuhan
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Ya, sosialisasi dilakukan secara bertahap kepada masing-masing pejabat eksekutif
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Ya, setiap kebijakan senantiasa memperhatikan POJK
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Ya, kebijakan dan SOP BPR senantiasa memperhatikan dengan Regulasi dan POJK
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Akan dilakukan secara bertahap untuk review kebijakan yang berlaku di BPR
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	Ya

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Laporan disampaikan oleh fungsi Kepatuhan dan disampaikan kepada Direktur Utama dan telah disampaikan kepada OJK
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Pada Tahun 2022 tidak ada temuan atau penyimpangan yang dilakukan direksi sehingga Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak membuat laporan ke OJK
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	3	Telah menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap fungsi audit intern dengan SK 030/SK/DIR-SDM/X/2016
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	Pedoman audit telah ada
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	4	Dikarenakan terbatasnya jumlah SDM Petugas Audit meragkap sebagai Operasional dibawah pemantauan dibawah Direktur Utama
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	3	Bertanggung jawab terhadap Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Selama tahun 2023 tidak ada program rekrutmen untuk bagian internal audit
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	3,20	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	Pedoman audit telah ada

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR Kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan tidak menugaskan pihak ekstern, audit ekstern dilakukan setahun sekali oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. dan untuk tahun 2023 karena aset dibawah 10 M sehingga tidak di audit oleh KAP
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Ya, dalam melaksanakan fungsi audit telah sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan audit.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Untuk meningkatkan kemampuan & pemahaman fungsi audit dengan ikut serta dalam pelatihan-pelatihan, baik yg dilaksanakan OJK maupun lembaga lain. untuk tahun 2022 peningkatan mutu keterampilan dilakukan secara daring.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Melaporkan hasil temuan dan rekomendasi pada Direktur Utama ditembuskan kepada Dewan Komisaris
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya, laporan hasil Audit hasil Intern Tahun 2023 telah disampaikan ke OJK

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR sebesar Rp6.074.566.629,-
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Telah mengangkat Audit dengan SK no.257/BPR-DP/X/2016 an Rita Maria
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	3	untuk tahun 2023 BPR DanaPos tidak menggunakan jasa Akuntan Publik dikarenakan aset BPR dibawah 10 M
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	3	untuk tahun 2023 BPR DanaPos tidak menggunakan jasa Akuntan Publik dikarenakan aset BPR dibawah 10 M
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	3	untuk tahun 2023 BPR DanaPos tidak menggunakan jasa Akuntan Publik dikarenakan aset BPR dibawah 10 M
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	3	untuk tahun 2023 BPR DanaPos tidak menggunakan jasa Akuntan Publik dikarenakan aset BPR dibawah 10 M
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	untuk tahun 2023 BPR DanaPos tidak menggunakan jasa Akuntan Publik dikarenakan aset BPR dibawah 10 M

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	4	BPR telah menunjuk Pejabat MR yang dirangkap oleh PE Kepatuhan , APU-PPT dan sebagai kepala Cabang
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	Ya, BPR telah memiliki kebijakan MR dan penetapan limit risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	Pengelolaan risiko tertuang dalam kebijakan MR
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	3,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	3	Kebijakan MR dibuat oleh Direksi

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan komisaris menyetujui kebijakan MR yang dibuat Direksi
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	4	Ya, BPR melakukan proses, pengukuran, dan pengendalian Risiko , namun dalam pelaksanaannya belum maksimal
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Pengendalian dilakukan pada seluruh aspek yang ada di BPR
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menerapkan seluruh risiko yang diwajibkan oleh OJK
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Ya, BPR telah memiliki sistem informasi manajemen yang dibutuhkan
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Ya, budaya MR telah diterapkan pada semua jenjang organisasi yang ada di BPR
	Total nilai skala penerapan	22	
	Rata-rata	3,14	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,26	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Ya, BPR telah membuat laporan mengenai profil risiko dan dilaporkan ke OJK tanggal 29 Juli 2022
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Ya, yang dilaporkan telah sesuai dengan ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	3	Ya, ketentuan pemberian kredit sesuai PKPB dan SOP tidak diperkenankan melampaui BMPK
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	Ya, senantiasa mengevaluasi kebijakan yang berlaku
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	3	Pemberian kredit selalu disesuaikan dengan BMPK yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Laporan BMPK disampaikan bersamaan dengan lapbul ke OJK setiap bulannya.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Tidak ada pelanggaran BMPK dalam penyaluran kredit

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	RBB PT. BPR DanaPos telah mendapat Persetujuan dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	RBB yang disusun telah menggambarkan rencana dan strategi bisnis BPR selama 1 thn kedepan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	RBB yang telah disusun disampaikan kepada pemegang saham dan mendapat dukungan dari pemegang saham
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,34	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	Ya, dalam menyusun RBB, PT. BPR DanaPos dengan memperhitungkan faktor eksternal, azas perbankan yg sehat dan prinsip kehati-hatian serta faktor risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Pencapaian rencana kerja dengan realisasi selalu dipantau dan dievaluasi setiap bulan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB untuk tahun 2024 telah dibuat sebagai acuan dan dikirim ke OJK secara online pada tanggal 11 Desember 2023
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Ya, telah tersedia laporan keuangan sesuai dengan data yg diinput/update
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Ya, dalam penyusunan laporan telah sesuai dengan yg seharusnya
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Ya, laporan tahunan disajikan sesuai ketentuan Otoritas jasa keuangan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah dilakukan transparansi informasi
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan yg disajikan telah sesuai dengan ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan Lap Publikasi dilaporkan sesuai ketentuan OJK
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan disampaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Pos

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**LAPORAN TATA KELOLA
PT.BPR DANAPOS
2023**



**Diketahui & disetujui
Komisaris**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dadang Rachmat', written in a cursive style.

**DADANG RACHMAT
KOMISARIS**

KESIMPULAN

Dari penilaian Tata Kelola yang ada di BPR Dana Pos telah melaksanakan ketentuan sebagaimana POJK yang ada, namun terdapat keterbatasan dalam penerapannya dapat dilihat masih terdapatnya rangkap jabatan di beberapa bagian, serta kekurangan direksi dan komisaris yang pemenuhannya akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 sebagaimana surat yang telah disampaikan ke OJK dengan nomor 012/BPR-DP/I/2022 tanggal 12 Januari 2022, dan disampaikan kembali hasil notulen rapat antara Direksi, Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali, yang disampaikan ke OJK dalam Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK tanggal 27 September 2023 dengan nomor surat 0101/BPR-DP/IX/2023. Hal tersebut mengingat sampai akhir tahun 2023 BPR Dana Pos masih melakukan efisiensi pegawai yang berimbas pada pengurangan jumlah karyawan, hal tersebut dilakukan mengingat pandemi covid-19 serta adanya Bencana di Kabupaten Cianjur yang sangat dirasakan imbasnya terhadap bisnis PT. BPR Dana Pos dan sampai dengan berakhirnya tahun 2023 masih belum pulih, kedepan BPR Dana Pos akan kembali menggalakan bisnis dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian sehingga BPR Dana Pos diharapkan dapat tumbuh dengan baik dan rangkap jabatan yang saat ini terpaksa dilakukan dapat ditata kembali sehingga penerapan Tata Kelola dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian Laporan Tata Kelola ini Kami sampaikan.

PT. BPR Dana Pos



Muhammad Ali
Direktur Utama